

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM**

##### **1 . Kondisi Ekonomi**

Realisasi Total Belanja Pemerintah Daerah Kota Subulussalam tahun 2012 adalah sebesar 306,28 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebesar 10,05 miliar rupiah (3,17%) dibandingkan realisasi total belanja tahun 2011. Total belanja tersebut berasal dari belanja langsung sebesar 159,37 miliar rupiah (52,03%) dan belanja tidak langsung sebesar 146,91 miliar rupiah (47,96%). Pengeluaran terbesar daerah digunakan untuk belanja pegawai yaitu sebesar 117,69 miliar rupiah (38,42%).

Pada Tahun 2012 pertanian masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB dengan kontribusi sebesar 33,01%, disusul oleh perdagangan, hotel dan restoran sebesar 29,68% dan sektor bangunan dan konstruksi sebesar 20,59%. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi terdapat pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 14,50% disusul oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 13,25%. Sedangkan laju pertumbuhan yang paling rendah terdapat pada sektor pertanian sebesar 0,04%. Pada tahun 2012, jumlah perusahaan yang berbadan hukum di Kota Subulussalam mencapai 181 perusahaan.

Perusahaan perorangan merupakan jenis perusahaan yang paling banyak terdaftar di Subulussalam, yaitu sebanyak 114 perusahaan atau 62,98% dari total perusahaan yang ada. Diikuti perusahaan berbentuk CV/Firma sebanyak 55

perusahaan atau 30,38%. Sedangkan perusahaan yang berbentuk PT tercatat sebanyak 4 perusahaan yang masih aktif atau 2,2%. Pada tahun 2012, total koperasi yang ada di Kota Subulussalam berjumlah 97 unit. Jika dilihat berdasarkan jenis koperasi, maka Koperasi Non Pegawai Negeri merupakan jenis koperasi terbanyak yang ada di sini, yaitu sebanyak 90 unit atau 92,78% dari seluruh koperasi di Kota Subulussalam. Koperasi Non Pegawai Negeri paling banyak terdapat di kecamatan Simpang Kiri yaitu sejumlah 43 unit atau 47,77% dari total seluruh Koperasi Non Pegawai Negeri. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, maka Kecamatan Simpang Kiri dan Penanggalan memiliki koperasi yang terbanyak yaitu 47 unit atau 48,45% dan 19 unit atau 19,53% dari seluruh koperasi di Kota ini.

Keadaan penduduk dan tenaga kerja daerah kota Subulussalam

a . penduduk

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Kota Subulussalam. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah daerah tidak dapat memecahkan masalah kependudukan, seperti pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk pada tahun 2011 adalah sebesar 68.990 jiwa. Jumlah penduduk ini meningkat pada tahun 2012 menjadi 70.707 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 2,28% untuk periode 2011-2012. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun dengan jumlah penduduk terbesar di kecamatan Simpang Kiri (28.898

jiwa), Sultan Daulat (13.404) dan Penanggalan (12.317 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk terkecil di kecamatan Longkib (4.546 jiwa).Kecamatan Simpang Kiri sebagai kecamatan yang terbesar penduduknya dikarenakan kecamatan ini memiliki akses jalan Provinsi.

Tabel 2.1

(Jumlah penduduk di Kota Subulussalam)

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk (Orang)	Kepadatan penduduk
Simpang Kiri	213	28.898	136
Penanggalan	93	12.317	132
Rundeng	320	11.543	36
Sultan Daulat	602	13.404	22
Longkib	163	4.546	28

Sumber : Subulussalam Dalam Angka 2013

Jumlah penduduk miskin di Kota Subulussalam dari tahun 2008 sampai tahun 2012 terus mengalami penurunan, namun persentase penduduk miskin di Kota Subulussalam masih tergolong tinggi yaitu sebesar 22,77 persen pada tahun 2012. Dengan analisis sederhana dapat kita katakan bahwa hampir seperempat penduduk Kota Subulussalam masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Rasio Jenis Kelamin, Rumah Tangga dan Rata-Rata Besarnya Anggota Rumah Tangga Pada tahun 2012, rasio jenis kelamin penduduk Kota Subulussalam berada diatas 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki -laki di

Kota Subulussalam lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Yang mana untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki –laki.

#### b. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kota Subulussalam usia 15 tahun ke atas yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2011 sebanyak 41.854 jiwa, atau 59,19 persen dari total penduduk. Sebesar 59,77 persen dari PUK termasuk dalam penduduk angkatan kerja yang merupakan penduduk dengan kegiatan utama bekerja dan/atau mencari kerja, sedangkan sisanya sebanyak 40,22 persen adalah penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang masih bersekolah atau hanya mengurus rumah tangga, dan lainnya yang bukan masuk kategori bekerja atau mencari pekerjaan.

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2012, di Kota Subulussalam terdapat 41.804 penduduk usia kerja. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja (15+). TPAK Kota Subulussalam pada tahun 2012 sebesar 54,84%. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Meski demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu

menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Pada tahun 2012, dari total angkatan kerja sebesar 25.019 jiwa, sekitar 91,74% dari mereka telah bekerja. Sebagian dari mereka yang bekerja sekitar 71,39% berpendidikan rendah (di bawah SMTA).

Di sisi lain, dapat pula dianalisa bagian angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan atau disebut pengangguran terbuka. Pada keadaan tahun 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Subulussalam sebesar 8,25% atau sekitar 2.065 jiwa. Berdasarkan lapangan pekerjaan, dari 22.954 penduduk yang bekerja, sekitar 57,18% dari mereka bekerja di sektor pertanian. Sektor-sektor lain yang cukup besar peranannya dalam penyerapan tenaga kerja diantaranya sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (18,7%) serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (12,34%).

## **2. Kondisi Sosial dan Budaya**

### **a. Sosial**

kondisi dan perkembangan sosial di Kota Subulussalam pada tahun 2013 dapat dilihat melalui indikator agama, kesehatan, keamanan, yang ada pada masyarakat, karena hal tersebut mencerminkan adanya hubungan dan toleransi yang saling terkait.

Dari 68.990 jiwa jumlah penduduk kota Subulussalam mayoritas adalah pemeluk Agama Islam yaitu 65,906 jiwa, kristen 1,190, dan katolik 306 jiwa. Jumlah tempat peribadatan di Kota Subulussalam terdiri dari 93 Masjid dan 110 Mushola, dan ada 3 gereja yang terdaftar yang keseluruhannya terdapat di kecamatan Penanggalan. Namun ada beberapa

gereja yang ilegal (tidak memiliki izin) yang semakin hari semakin banyak jumlahnya, meskipun demikian masyarakat tetap aman damai dan saling bertoleransi, ini terbukti tidak pernah ada kasus kekerasan agama terjadi di Kota Subulussalam, bahkan saat peristiwa pembakaran gereja di Aceh singkil masyarakat muslim dan kristen di kota Subulussalam bersama-sama gereja dan umat kristiani.

Fasilitas kesehatan yang tersebar di wilayah Kota Subulussalam terdiri dari 1 Puskesmas Perawatan, 4 Puskesmas non Perawatan, 64 Poskesdes, 5 Pusling, dan 1 Klinik Swasta dan 1 Rumah Sakit Pemerintah. Sedangkan untuk jumlah tenaga kesehatan di Kota Subulussalam terdapat 19 tenaga dokter umum, 5 dokter gigi, 84 bidan. kasus kesehatan yang paling menonjol adalah penyakit ISPA, common cold, infeksi kulit, sakit lambung, dan diabetes.

#### b. Budaya

Kebudayaan di kota Subulussalam kebanyakan mengangkat tema kesukuan etnis Singkil yang menjadi suku utama di Kota Sulussalam, di Kota Subulussalam sendiri terdapat Majelis adat Aceh yang mengatur keseluruhan Adat istiadat, kesenian, dan sejarah di Kota Subulussalam. terdapat 10 sanggar tari di Kota Subulussalam dan 13 LSM/ormas.

#### c. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas penduduk secara umum dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Angka Partisipasi

Sekolah (APS) di Kota Subulussalam menunjukkan peningkatan pada jenjang pendidikan SD dan SLTA pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011, namun juga terjadi penurunan tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SLTP dan Perguruan Tinggi pada periode yang sama. Sejak lama Pemerintah telah mencanangkan Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Program ini menargetkan semua warga negara Indonesia memiliki pendidikan minimal antara Sekolah Menengah Pertama dengan mutu yang baik.

Dengan bekal tersebut diharapkan warga negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut dan mendapatkan dirinya lebih lanjut dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sayangnya, partisipasi penduduk dalam mensukseskan program tersebut masih kurang. Hal ini terlihat dari data rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam masih relative rendah, meskipun dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam sebesar 7,63 tahun atau dapat diartikan secara umum penduduk memutuskan berhenti sekolah di tingkat SLTP kelas 2.

Kemampuan untuk membaca dan menulis penduduk dapat dilihat dari indikator melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Subulussalam pada tahun 2012 sebesar 96,65 persen mengalami peningkatan tipis dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 96,55 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebagian kecil saja masyarakat di Kota Subulussalam yang masih belum bisa

menulis dan membaca. Di Kota Subulussalam pada tahun 2011 rasio murid – guru SD adalah 1:12 untuk SMP sebesar 1:17, dan SMA sebesar 1: 13. Angka tersebut menunjukkan bahwa di Kota Subulussalam pada jenjang SD dan SMA jumlah guru sudah cukup ideal dengan jumlah murid yang dididik, sedangkan pada jenjang SMP masih membutuhkan jumlah tenaga pendidik sehingga angka rasio ideal guru murid sebesar 1:10 bisa terpenuhi.

### **3. Kondisi Pertanian Kota Subulussalam**

Kota Subulussalam memiliki potenssi pertanian yang cukup baik. Luas lahan sawah mencapai 924 Ha dengan total produksi 2.732 Ton, sedangkan padi ladang dengan luas lahan sebesar 322 Ha total produksi mencapai 782 Ton. Potensi Kota Subulussalam yang paling menonjol adalah perkebunan kelapa sawit. Pada saat ini luas areal tanaman kelapa sawit milik rakyat mencapai 14.675 Ha, dimana yang luas tanaman menghasilkan sebesar 9.419 Ha atau 64,18 %. Sementara itu tota produksi 117.737 Ton/Tahun. Jika dilihat dari produksi perkebunan rakyat pada tahun 2011 mencapai 8,0 Ton/Ha. Prokduktivitas tertinggi yaitu pada Kecamatan Simpang Kiri yang mencapai 9,6 Ton/Ha dan yang terendah di Kecamatan Sultan Daulat yaitu 5,5 Ton/Ha. Meningkatnya lahan perkebunan kelapa sawit memacu kebutuhan pengolahan biji sawit. Pada saat ini telah beroperasi 3 (tiga) perusahaan pengolahan biji kelapa sawit yaitu : PT. Global Sawit Semesta, yang berlokasi di Kecamatan Penanggalan, PT. Bangun sejahtera Lestari di kecamatan Simpang Kiri dan PT. Samudera Sawit Nabati di Kecamatan Sultan Daulat.



Perusahaan ini tidak hanya mengolah hasil perkebunan kelapa sawit dari Kota Subulussalam, namun juga dari Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Produksi tanaman pangan terbesar di Kota Subulussalam pada tahun 2012 adalah produksi padi yakni sebesar 6.246 ton, diikuti oleh jagung sebesar 1.596 ton, ubi jalar 93 ton, dan kedelai 38 ton. Produksi Perkebunan Luas tanaman perkebunan rakyat untuk beberapa jenis tanaman umumnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Komoditi yang mengalami peningkatan yaitu luas tanaman kelapa sawit meningkat sebesar 11,9% dan kakao sebesar 54,54%. Sedangkan luas tanaman karet dan kelapa hanya mengalami sedikit saja peningkatan luas tanaman. Sementara untuk tingkat produksi beberapa jenis tanaman perkebunan yang mengalami kenaikan terbesar adalah tanaman kelapa sawit, yang meningkat sebesar 6,6% dibandingkan tahun 2011.

Populasi ternak besar terdiri dari sapi perah, sapi potong, kerbau dan kuda. Pada tahun 2012, populasi ternak besar yang terdapat di Kota Subulussalam hanya sapi potong dan kerbau dengan populasi sebesar 1.862 ekor dan 104 ekor. Populasi ternak sapi sebagian besar berada di kecamatan Simpang Kiri sebanyak 632 ekor, kecamatan Rundeng sebanyak 474 ekor, dan kecamatan Sultan Daulat sebanyak 284 ekor. Populasi ternak kecil terdiri dari kambing, domba dan babi. Pada tahun 2012 populasi ternak kecil di Kota Subulussalam terdiri dari kambing, domba dan babi dengan total populasi berturut-turut adalah 6.685 ekor kambing, 1.563 ekor domba, dan 146 ekor babi.

Sebagian besar berada di kecamatan Rundeng sebesar 2.968 ekor, dan kecamatan Simpang Kiri sebesar 1.633 ekor. Populasi ternak domba terbesar berada di kecamatan Rundeng sebanyak 709 ekor dan kecamatan Simpang Kiri sebanyak 384 ekor. Populasi unggas terdiri dari ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik/itik manila. Pada tahun 2012, populasi unggas di Kota Subulussalam terdiri dari ayam kampung 19.950 ekor, ayam petelur 19.200 ekor, ayam pedaging 188.600 ekor dan itik 2.950 ekor (Tabel 6.3.2). Populasi ayam kampung terbesar berada di kecamatan Simpang Kiri sebanyak 8.500 ekor. Populasi ayam pedaging tertinggi berada di kecamatan Simpang Kiri sebesar 107.600 ekor, kecamatan Rundeng 32.500 ekor, dan kecamatan Sultan Daulat sebesar 25.500 ekor.

## **B. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam**

### **1. Kedudukan**

BP3AKB (Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kota Subulussalam, berkedudukan di Jln. Raja Tua Kampong Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terbentuk setelah disahkannya Kota Subulussalam sebagai daerah otonom yang terpisah dari Aceh Singkil dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Subulussalam. BP3AKB Kota Subulussalam terbentuk pada akhir tahun anggaran 2009 Kota Subulussalam. Sebelum terbentuknya BP3AKB, tugas pokok dan fungsi BP3AKB dikelola oleh Sekretariat Daerah dan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam. Setelah terbentuknya BP3AKB maka tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diambil alih oleh BP3AKB Kota Subulussalam.

a . tingkat golongan pegawai

Tabel 2.3

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan I	0
2	Golongan II	3
3	Golongan III	16
4	Golongan IV	3
	Jumlah Total	22

(Golongan pegawai di BPPPAKB Kota Subulussalam)

sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013.

Berdasarkan tabel diatas, golongan paling banyak adalah golongan III yakni 16 orang golongan II dan IV berjumlah 3 orang.

b . Tingkat Pendidikan Pegawai

Klasifikasi personil berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

(Data tingkat golongan pegawai BPPPAKB)

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SD-SLTA	17
2	Diploma	5
3	Sarjana / SI	21
4	Paska sarjana	0
	Jumlah total	43

sumber : LAKIP BP3AKB kota Subulussalam

Berdasarkan tabel diatas tingkat pendidikan pegawai paling banyak dengan taraf pendidikan sarjana / S1 dengan jumlah sebanyak 21 orang, sedangkan tingkat pendidikan paling sedikit dengan taraf pendidikan diploma sebanyak 5 orang.

## **2. Visi dan Misi BP3AKB**

### 1.2 Visi

Terwujudnya masyarakat yang bermartabat, amanah ,demokratis dna sejahtera dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan anak dengan berdasarkan pada nilai-nilai islam yaang berkeadilan gender.

### 1.3 Misi

Misi menyebarluaskan informasi tentang pemberdayaan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ke tengah masyarakat

Membina dan memantapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran perempuan pada pembangunan, perlindungan atas hak-hak anak dan penerapan keluarga berencana bagi suksesnya pelaksanaan keluarga sejahtera

### **3. Tujuan dan Sasaran BP3AKB Kota Subulussalam**

#### 1.1 . Tujuan

- a. pengolahan data/informasi pembangunan daerah yang berkualitas
- b. meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak dan perempuan
- c. meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- d. meningkatkan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan

#### 1.2 . Sasaran

- a. tersedianya sistem pengolahan data/informasi yang akurat
- b. terwujudnya kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
- c. terwujudnya pembangunan responsif gender
- d. terwujudnya peningkatan keluarga sejahtera

### **4. cara pencapaian Tujuan dan Sasaran**

### 1.1 kebijakan

- a. terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya terwujudnya keluarga kecil berkualitas
- b. tercapainya peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas dan perlindungan anak dan terhapusnya bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak.
- c. tercapainya koordinasi yang kuat dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan perlindungan Anak dan keluarga Berencana dengan mengembangkan lembaga sosial.

### 1.2 . program

- a. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- b. program peningkatan disiplin aparatur
- c. program peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur
- d. program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan Anak
- e. program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- f. program keluarga berencana
- g. program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- h. program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

### 1.3 kegiatan

- a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- b. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- c. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- d. pengadaan kendaraan dinas/operasional
- e. pengadaan perlengkapan gedung kantor
- f. pengadaan rumah jabatan/dinas
- g. pelatihan keterampilan untuk perempuan
- h. verifikasi pertanggungjawaban musrena
- i. advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
- j. fasilitas pengembangan P2TP2A

## **5. Tugas pokok dan fungsi struktur Organisasi**

### **5.1 . Tugas Pokok dan Fungsi BP3AKB**

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Pengarusutamaan Gender  
Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana teknis  
di Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan;

- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan kebijakan Bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Advokasi, Pergerakan Dan Informasi;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **6 . Struktur Organisasi**

Adapun susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

6.1 Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan;



- d. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- f. Bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

6.2 Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub bagian Keuangan; dan
- c. Sub bagian Program.

## **7 Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:

7.1 Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Hukum Dan Politik.

7.2 Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang SDM dan Ekonomi; dan

7.3 Seksi Pemberdayaan Organisasi Dan Pengarusutamaan Gender

Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan bertugas untuk:

7.4 Pelaksana teknis di bidang analisis dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam unsur pelaksana teknis di bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan.

7.5 Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan.

7.6 Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis terkait Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Hukum dan Politik.

7.7 Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis terkait Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang SDM dan Ekonomi.

7.8 Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis terkait Pemberdayaan Organisasi dan Pengarusutamaan Gender.

7.9 Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, terdiri dari:

7.10 Seksi Perlindungan Perempuan;

7.11 Seksi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak; dan

## **8 Seksi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak.**

Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak bertugas untuk:

8.1 Pelaksana teknis di bidang penyusunan dan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan bidang perlindungan perempuan dan anak.

8.2 Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, pelayanan dan perlindungan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan perempuan dan anak di Daerah.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi

8.3 Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang perlindungan perempuan dan anak;

8.4 Melakukan identifikasi dan evaluasi serta monitoring di bidang perlindungan perempuan dan anak

8.5 Melaksanakan evaluasi dan pelapor tugas bidang perlindungan perempuan dan anak; d.pelaksanaansosialisasi dan bimbingan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;

8.6 Melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang perlindungan perempuan dan anak; dan

8.7 Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8.8 Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian Penduduk;
- b. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- c. Seksi Kesehatan Reproduksi.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga bertugas untuk:

- a. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan unsure kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **9 Bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera**

Bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:



5.	E	P	40	PNS	Sarjana	Penelantaran Dan psikis	oleh P2TP2A
6.	R	P	16	Pelajar	SMA	Seksual	Kepolisian
7.	N.L	P	17	Pelajar	SMA	Seksual	Kepolisian
8.	EP	P	53	IRT	SMA	Psikis, sosial, penelantarn	Mediasi P2TP2A
9.	HS	P	22	IRT	SMA	Psikis dan fisik	Kepolisian dan P2TP2A
10	S.Bm	P	29	IRT	SMA	Psikis dan fisik	Kepolisian dan P2TP2A
11.	V.M	P	30	IRT	SMA	Psikis dan fisik	Kepolisian dan P2TP2A
12	A	P	16	Pelajar	SLTP	Seksual	Kepolisian
13	Az	P	19	IRT	SMA	Seksual	Kepolisian
14	AI	P	28	IRT	SMA	Psikis dan fisik	Kepolisian dan P2TP2A
15	AS	P	15	Pelajar	SMA	Fisik dan	Kepolisian

						seksual	
16	Sk	P	34	IRT	SMA	Ekonomi, psikis	Mediasi oleh p2TP2A
17	R	P	26	IRT	SMA	Psikis dan fisik	Naik ketingkat persidangan
18	SB	P	34	IRT	SMA	Fisik, psikis, ekonomi	Pengadilan proses perceraian
19	AS	P	30	IRT	SMA	Seksual, fisik, psikis	Naik ketahap pengadilan
20	NL	P	17	IRT	SMA	Psikis dan fisik	Kepolisian dan p2tp2a

## 10 Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dilakukan pemerintah provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- 10.1 Membentuk Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Rumoh Putroe Aceh pada Tahun 2003 dan P2TP2A di Kab/Kota sejak tahun 2005.

- 10.2 Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dengan Keputusan Gubernur Nomor 260/322/2006, dan diperkuat dengan Pergub No. 65 Tahun 2011 serta dilengkapi dengan Pergub No. 66 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedure Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- 10.3 Membentuk Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2007, yang telah dilengkapi dengan Pergub No. 5 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak.
- 10.4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan.
- 10.5 Pelatihan menjahit, menyulam, dan membuat kerajinan usaha serta kuliner kepada para perempuan korban kekerasan.
- 10.6 Pendampingan terhadap korban kekerasan dari awal hingga kasus selesai.
- 10.7 Perlindungan: perlindungan sesuai dengan penerapan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT sehingga pelaku akan dikenakan hukuman pidana.dengan undang-undang ini maka korban akan mendapatkan perlindungan dimata hukum karena dapat melidungi keluarga korban dan juga saksi.

10.8 Sosialisasi melalui kampanye, media, media audio, media visual, media audio visual di televisi daerah.

Program penanganan KDRT BP3AKB Kota Subulussalam

Program pemberdayaan Perempuan antara lain :

- A. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- B. Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- C. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak